

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018-2023**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sampurasun.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sesuai harapan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang berupa konsep yang digunakan oleh SKPD untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan hasil revisi yang didasari oleh perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2023 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati Purwakarta Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya



mempunyai itikad



dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya.

Amin Yaa Robbal ' Aalamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwakarta,

Kepala

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Purwakarta,

AGUNG WAHYUDI, ST., MT., MM.

NIP. 19680911 199302 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-8
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	I-14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	I-14
2.2 Pencapaian Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.	I-14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	I-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	I-18
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	I-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten	III-7
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-10
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1 Visi dan Misi SKPD	V-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	IV-2
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	IV-3
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	VI-1
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VII-1
BAB VII. PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta	I-15
TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta	IV-2
TABEL 5.4 Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	VI-5
TABEL 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan	I-7



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah daerah merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk tujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki, yang meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menuju kearah tersebut diperlukan adanya pemerintahan daerah yang mandiri, kreatif, inovatif dan lebih responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat yang memungkinkan kinerja layanan masyarakat (*public services*) menjadi lebih baik sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

Seiring dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaran pemerintahan diarahkan untuk pencapaian *good governance and clean government*, serta optimalisasi pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan



sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* atau pemerintahan yang baik. Agar *good governance* dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik dari pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Sesuai dengan penerapan *good governance* diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan tersebut melalui perencanaan yang baik, perencanaan pembangunan dengan tahapan, prosedur, pengendalian dan evaluasi yang jelas. Perencanaan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya publik yang berdampak pada proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3)



penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Lingkup dan tingkatan pemerintahan tersebut merupakan kesatuan dan saling terkait dalam hal perencanaan yang bermuara kepada tujuan nasional.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Kemudian pada tiap Perangkat Daerah menindaklanjuti perencanaan daerah tersebut melalui perencanaan Perangkat Daerah baik perencanaan jangka menengah melalui RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN maupun perencanaan jangka pendek melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja) sebagai penjabaran dari Renstra tersebut.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 1 (Satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah disusun Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode tahun 2018 - 2023.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan konsep yang digunakan oleh Dinas untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya.



Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati/Walikota terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Dinas serta tolak ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Dinas melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas.
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.



6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Dinas yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakannya. Renstra ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka



panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Dinas. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan kemana daerah (Perangkat Daerah) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya.

Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat :

1. Memastikan sinergitas dan konsistensi antara Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas dengan perencanaan di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta serta RPJMD Provinsi Jawa Barat.
2. Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya melalui forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah, dan forum multi *Stakeholders* lain serta metode penjangkaran aspirasi masyarakat.
5. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra Dinas ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah tersedianya dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi, kebijakan, program,



dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dari tahun 2018 – 2023 mendatang sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta untuk satu tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purwakarta;
3. Menentukan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi;
5. Merumuskan program dan kegiatan dalam urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fungsi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterkaitan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.4. Sistematika Penulisan;

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota



3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 - 2023



**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
2	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan dan dipelihara (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	140	0	100	100	100	140	0
3	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat aparatur (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	0	100	100	100	100	0
4	Persentase disiplin kerja pegawai (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
5	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	0	100	100	100	100	0
6	Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/ Direvitalisasi (titik)	-	0	34	5	5	5	5	20	29	20	15	0	100	85.3	100	100	0
7	Presentase RTH yang terpelihara (%)	-	100	100	100	100	100	100	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0
8	Persentase Ornamen Kota Yang Terpelihara	-	100	100	100	100	100	100	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0
9	Rasio Lampu Hias Yang Terpasang (%)	-	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	0	1.2	0	0	0	0	75	0	0	0
10	Persentase RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (%)	-	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	0	0.3	1.89	0	0	0	37.5	100	0
11	Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%)	-	10	4	10	10	10	10	0	4	10	0	0	0	100	100	0	0
12	Rasio Ketersediaan TPU milik pemda	-	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	0	3.5	0	0	0	0	48.6	0	0	0
13	Jumlah Unit Pengelolaan Limbah Komunal Yang Dibangun (Unit)	-	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat)	-	192	192	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN**
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta



15	Rasio Rumah Layak Huni (%)	-	89.34	34	91.22	92.16	93.1	94.04	0	34	91.94	67.37	0	0	100	100	73.1	0
16	Persentase Desa Rawan Air Bersih (%)	-	18.23	0.00	13.03	13.03	7.83	5.23	0	0.00	13.03	13.03	0	0	0	100	100	0
17	Persentase Mata Air Yang Diamankan (%)	-	32.8	35	40	45	50	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%)	-	0	0	40	50	60	70	0	0	0	80	0	0	0	0	160	0
19	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%)	-	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0
20	Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari)	-	12	20	11	11	10	9	0	20	11	10	0	0	100	100	90.9	0
21	Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Yang Dipantau (%)	-	10	20	30	40	50	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Persentase Pengaduan dan Sengketa Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (%)	-	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%)	-	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
25	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Unit	0	0	0	0	2	2	0	0	0	6,523	0	0	0	0	0	0
26	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	0	0	0	0	2	2	0	0	0	22.66	0	0	0	0	0	0
27	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	Ha	0	0	0	0	2	2	0	0	0	22.66	0	0	0	0	0	0

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN**
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta



28	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Penunjang Perumahan	Unit	0	0	0	10	10	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
29	Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Doku- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	0	0	0	4	4	4	0	0	0	20	0	0	0	0	100	0
31	Panjang Saluran Air Bersih Perpipa-an Yang Dibangun	Km	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	0	0	0	1	1	1	0	0	0	20.0	0	0	0	0	100	0
33	Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai	Persen	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki	Meter	0	0	0	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Dibangun	Unit	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- 1.** Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pada umumnya masih rendah, khususnya dalam hal penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 2.** Belum optimalnya disiplin dan motivasi kerja pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3.** Masih kurang optimalnya manajemen sumber daya manusia, sehingga berpengaruh terhadap sistem kinerja bidang Perumahan Kawasan Permukiman.



4. Kurang tersedianya pedoman-pedoman teknis di bidang Perumahan Kawasan Permukiman mutlak sangat diperlukan. Pedoman-pedoman tersebut tentunya dapat dijadikan acuan dan dasar dalam operasional pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan tidak tersedianya atau tidak lengkapnya keberadaan pedoman teknis ini dapat berakibat lemahnya produk yang dihasilkan baik secara kuantitas maupun dari sisi aspek legalitas.
5. Kurang tersedianya basis data terpadu yang aktual dan akurat di bidang Perumahan Kawasan Permukiman;
6. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Perumahan Kawasan Permukiman.
7. Masih terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta untuk mendanai program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi, misi dan program prioritas yang menjadi kampanye pasangan tersebut serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 :



"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Dalam mewujudkan Visi tersebut untuk operasionalnya ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan** Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan **Kesejahteraan Sosial.**
- 2.** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.
- 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur** Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- 4.** Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa
Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut ditetapkan pula program prioritas yang merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan lanjutan yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023.

Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam **"9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA "** yang terdiri atas :

1. Pelayanan Pendidikan Terintegrasi Dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat Melalui Program Satu Desa Satu SMP Dan Satu SMA/SMK Berbasis Pemahaman Al-Qur'an Dan Kitab Kuning, Serta Penambahan Layanan Angkutan Sekolah Gratis Untuk Daerah Prioritas Yang Disesuaikan Dengan Rasio Jumlah Siswa Pada Setiap Desa/Kelurahan;



2. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis Dan Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter Dan Satu Bidan Berbasis Online Serta Jaminan Perawatan Kesehatan DiSembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya;
3. Pengembangan Pola Infrastruktur Pertanian Primer, Sekunder Dan Tersier Secara Terintegrasi Berupa Pembangunan Irigasi, Bendungan Kecil Dan Bendungan Besar Serta Pengembangan Produk Asuransi Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan;
4. Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Dengan Mendorong Tumbuhnya Produk Unggulan Melalui Program Satu Desa Satu Produk Unggulan, Serta Pengembangan Kelembagaan Usaha Desa Melalui Program Investasi Desa, Baik Yang Dikelola Oleh Badan Usaha Milik Desa Maupun Lembaga Usaha Lainnya;
5. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis Industri dan Pariwisata Melalui Penambahan Lebar Jalan Kabupaten dari 6 Meter Menjadi 9 – 12 Meter dan dilengkapi dengan **Penerangan Jalan Umum (PJU) yang Berestetika serta Penataan Seluruh Jalan Lingkungan Dengan Pengelolaan Teknologi Jalan Yang Ramah Lingkungan, Pengembangan Bangunan Pemerintah, Mesjid, Mushola, Madrasah, Majelis Taklim Dan Rumah Ibadah, Rumah Rakyat Miskin, Penambahan Ruang Terbuka Hijau Dan Pusat Kebugaran Publik Seperti Sport Center, Lapang Sepakbola Dan Sarana Olahraga Lainnya Di Setiap Desa/Kelurahan, Serta Penataan Dan Pengembangan Jaringan Listrik Dan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan;**



6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pedesaan Melalui Program Pengembangan Kampung Budaya, Pendidikan Pariwisata Berbasis Alam Dan Penyiapan Sawah-Sawah Abadi dan Sumber Air Abadi Oleh Pemerintah Daerah Yang Dikelola Oleh Masyarakat Serta Jaminan Kesejahteraan Publik Melalui Pembagian Beras Premium Bagi Warga Miskin Melalui Program Atm Beras;
7. Pengembangan Pendidikan Profesional Bagi Siswa Di Sekitar Industri Melalui Program Sekolah Manager Setingkat Diploma dan S1, Serta Pengembangan Beasiswa Bagi Para Calon Doktor Di Bidang Studi Agama;
8. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa, RT, RW, Linmas, Guru Ngaji, Karang Taruna, BPD, Bamusdes, Imam Masjid, Muadzin, Bilal, Khotib, Melalui Program Asuransi Kesehatan, Kecelakaan Kerja Dan Hari Tua;
9. Pengembangan Iklim Investasi Melalui Pembangunan Pusat Pelayanan Perijinan Terpadu Dengan Pembangunan Mall Layanan Perijinan Yang Berstandar Nasional Untuk Layanan Dasar Publik Seperti Penerbitan Izin Investasi, IMB, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah Dan Layanan Publik Lainnya Serta Menumbuhkembangkan Umkm Melalui Program Stimulus Permodalan, Pengembangan Inovasi Produk, Pemasaran Dan Revitalisasi Pasar Tradisional Yang Ramah Lingkungan.

Memperhatikan Visi, Misi dan Program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, terdapat kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Keterkaitan tersebut tertuang dalam :



1. Misi Pertama :

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pengertian dari Misi ini adalah Terwujudnya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

2. Misi Ketiga :

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus **pembangunan infrastruktur jalan** dan jembatan, **peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman**, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ **rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan.**

3. Program prioritas ke-5:

- (5) Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Berbasis Industri Dan Pariwisata Melalui Penambahan Lebar Jalan Kabupaten Dari 6 Meter Menjadi 9 – 12 Meter Dan Dilengkapi Dengan **Penerangan Jalan Umum (PJU) Yang Berestetika Serta Penataan**



Seluruh Jalan Lingkungan Dengan Pengelolaan Teknologi Jalan Yang Ramah Lingkungan, Pengembangan Bangunan Pemerintah, Mesjid, Mushola, Madrasah, Majelis Taklim Dan Rumah Ibadah, Rumah Rakyat Miskin, Penambahan Ruang Terbuka Hijau Dan Pusat Kebugaran Publik Seperti Sport Center, Lapang Sepakbola Dan Sarana Olahraga Lainnya Di Setiap Desa/Kelurahan, Serta Penataan Dan Pengembangan Jaringan Listrik Dan Air Bersih Perkotaan Dan Perdesaan.

Dalam program prioritas yang tertuang dalam 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa yang ke-5 terkait Pengembangan Infrastruktur Jalan dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) Yang Berestetika Serta Penataan Seluruh Jalan Lingkungan Dengan Pengelolaan Teknologi Jalan Yang Ramah Lingkungan, Penataan Dan Pengembangan Jaringan Listrik Dan Air Bersih Perkotaan Dan Perdesaan. Selanjutnya pada program ke-5 terkait dengan Pengembangan Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui Pengembangan Bangunan Pemerintah dan Penambahan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur



pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman. Disamping itu, infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals, yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) meningkatkan kualitas lingkungan. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut terlihat melalui: (i) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah;

(ii) Infrastruktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (iii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan pedesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan.



Seluruh penyediaaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (*economic gains*), menghadirkan keuntungan sosial (*social benefits*), meningkatkan layanan publik (*public services*), serta meningkatkan partisipasi politik (*political participation*) di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga harus selaras dan bersinergi dengan sektorsektor lainnya sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka perwujudan dan pemantapan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU "Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;



2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasar identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas pasangan Kepala Daerah terpilih dan juga dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.



Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur dalam pembangunan. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, belum memenuhi kuantitas maupun kualitasnya.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan, terutama untuk infrastruktur yang perlu mendapat perhatian, yaitu: jaringan jalan, jaringan Saluran Drainase dan Pelayanan air bersih terutama di bidang prasarana dan sarana, pemeliharaan dan pembangunannya masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, serta masih kurangnya ketersediaan rumah yang layak huni.

Masih kurang lancarnya transportasi terutama jalan dan jembatan di beberapa ruas Kabupaten Purwakarta. Kondisitersebut sangat mempengaruhi terhadap aktivitas perekonomian yang kurang lancar dan aksesibilitas pelayanan secara umum, sehingga diperlukannya peningkatan jalan dan jembatan maupun pemeliharaannya. Selain itu masalah lain yang dimiliki Kabupaten Purwakarta adalah Permasalahan lingkungan. Kualitas lingkungan di Purwakarta sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : Berkurangnya daerah resapan, tidak maksimalnya fungsi drainase dan terbatasnya ruang terbuka hijau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir dan kekeringan.

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :



1. Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang:

Isu strategis di Bidang Urusan Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut :

- Pertumbuhan infrastruktur wilayah tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan usaha.
- Tidak berimbangnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur antar bagian wilayah.
- Kurangnya Tingkat Aksesibilitas Prasarana Infrastruktur Wilayah.
- Belum meratanya dukungan infrastruktur wilayah jaringan jalan hingga ke pelosok perdesaan dan daerah terpencil, faktor utamanya berasal dari keterbatasan kemampuan pembiayaan/penganggaran. Pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pendapatan asli daerah yang sedang dilaksanakan pada saat ini belum mampu mengangkat keterpurukan daerah dalam hal anggaran, sehingga salah satu dampaknya kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.



- Belum optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat. Penyediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta sebagian besar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta dengan sumber pengambilan air baku dari mata air Cigoong dengan debit 65 liter/ detik dan dari intake Waduk Jatiluhur (IPA Ubrug) sebesar 160 liter/ detik. Pada saat ini air bersih di Kabupaten Purwakarta khususnya di perkotaan baru terlayani sebanyak 48,76% satuan sambungan langsung untuk rumah dan industri. Sedangkan penyediaan air bersih untuk perdesaan menggunakan sumber mata air yang ada yang dikelola oleh warga masyarakat dengan bantuan pengadaan instalasi dan distribusinya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adapun berdasarkan data terakhir, penduduk yang tidak menggunakan sumber dari mata air maupun dari PDAM menggunakan sumber air dangkal sebanyak 81% dan sumur dalam 16%.
- Belum optimalnya penanganan drainase secara baik dan berwawasan lingkungan. Belum optimalnya penanganan drainase karena rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap penanganan drainase dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik.
- Tidak berfungsinya saluran drainase. Kelangkaan lokasi untuk pembuangan sampah menyebabkan masyarakat membuang sampah ke saluran drainase. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan persentase kawasan tergenang dan persentase terhambatnya fungsi drainase.



2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Isu strategis di Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut :

- Tingginya *back log* penyediaan rumah tinggal
- Terbatasnya kemampuan pembiayaan masyarakat untuk tempat tinggal yang layak
- Meningkatnya lingkungan permukiman padat / kumuh
- Terbatasnya sarana dan prasarana dasar permukiman
- Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan.

Penyediaan prasarana dan sarana dasar oleh pemerintah terhadap kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah mempunyaikemampuan untuk memiliki rumah yang layak huni dalam kawasan yang sehat. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana tersebut masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah.

- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya perijinan untuk pembangunan perumahan menimbulkan ketidakefisienan pasar



perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (*pass-through*) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (*affordability*) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan.

- Kurang optimalnya pengelolaan dan penataan taman pemakaman umum di Kabupaten purwakarta
- Kurangnya ruang terbuka hijau
- Kurangnya pemerataan PJU di desa-desa
- Banyaknya PJU yang tidak terpelihara dengan baik



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta ini adalah agar Dinas Proaktif dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosakan secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan wawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi.

Intinya dari perencanaan strategis adalah proses penelitian situasi yang sedang berlangsung, antisipasi ke arah masa depan dari suatu organisasi, penetapan sasaran, pengembangan strategis untuk mencapai sasaran tersebut, dan pengukuran hasil.

Memberikan arah perwujudan rencana peningkatan dan pengembangan kiprah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang konseptual, kontekstual, obyektif, faktual dan berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga jelas dan lugas tolak ukurnya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

Berikut ini adalah Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Manajemen Perkantoran Secara Optimal	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	80	83	85	90	95	97
			Presentase RTH yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Terpelihara (%)	100	100	100	100	100	100
			Rasio Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Yang Terpasang (%)	80	80	80	80	80	80
		Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan	Jumlah Lokasi yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (titik)	8	8	8	8	8	8
			Jumlah Daerah Yang Tertangani (titik)	3	3	3	3	3	3
			Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan (%)	5	5	5	5	5	5
			Rasio Ketersediaan TPU milik pemda (%)	1,79	2,18	2,57	2,96	3,35	3,74
			Rasio Ruman Layak Huni (%)	92,33	92,57	92,81	93,05	93,29	93,53
3	Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	Presentase Cakupan layanan Air Minum(%)	79,12	80	81,5	83	84,5	86

4.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi



yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Presentase Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan Surat Keputusan
2. Presentase Cakupan layanan Air Minum
3. Rasio Rumah Layak Huni

4.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan
2. Tersedianya Hunian Yang Seluruh Masyarakat
3. Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat
4. Meningkatkan Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, dan kondisi akhir.

Rencana Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Permukiman
5. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
6. Program Kawasan Permukiman
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh



5.2 Indikator Kinerja

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 antara lain :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah
2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki
4. Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan
5. Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan
6. Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan
7. Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
8. Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun
9. Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun
10. Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun
11. Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai
12. Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun/Diperbaiki
13. Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun/Diperbaiki
14. Jumlah Sarana dan Peasarana Permukiman Yang Dibangun



Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta antara lain :

10. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
11. Sarana dan prasarana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta
12. Masyarakat/pelaku usaha urusan pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang.
13. Masyarakat yang belum memiliki rumah tidak layak huni.
14. Masyarakat yang mendirikan bangunan.
15. Kelompok masyarakat komunitas perumahan.
16. Instansi/SKP yang menggunakan bangunan dan gedung negara.
17. Sarana dan prasarana air bersih komunal.
18. Jalan lingkungan.
19. Drainase dan gorong-gorong lingkungan.
20. Ruang Terbuka Hijau.
21. Penerangan Jalan Umum.

5.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif secara garis besar merupakan bagian dari matriks strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan dukungan alat pengukur strategis.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta periode tahun 2018 - 2023 dapat tergambar pada tabel berikut :



Tabel 5.4 Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				43,354,147,785			45,521,855,174
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	7,150,000,000		1 Paket	7,507,500,000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	7,150,000,000		1 Paket	7,507,500,000
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Purwakarta	1 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	105,000,000
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Purwakarta	1 liter/detik	5,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 liter/detik	5,250,000,000
1	03	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Purwakarta	1 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	52,500,000
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Purwakarta	1 Rumah Tangga	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Rumah Tangga	2,100,000,000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	100,000,000		1 Paket	105,000,000
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	100,000,000		1 Paket	105,000,000
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Purwakarta	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	52,500,000
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Direhabilitasi	Purwakarta	1 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	52,500,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dosmetik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	950,000,000		1 Paket	997,500,000
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dosmetik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	950,000,000		1 Paket	997,500,000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023



1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Purwakarta	1 Rumah Tangga	54,000,000		1 Rumah Tangga	56,700,000
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Purwakarta	1 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	157,500,000
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Purwakarta	1 Rumah Tangga	746,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1 Rumah Tangga	783,300,000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	8,000,000,000		1 Paket	8,400,000,000
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	8,000,000,000		1 Paket	8,400,000,000
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Purwakarta	1 Dokumen	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	472,500,000
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Purwakarta	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	52,500,000
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Purwakarta	1 M	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 M	2,625,000,000
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Purwakarta	1 M	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 M	2,625,000,000
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Purwakarta	1 M	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 M	2,625,000,000
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	27,154,147,785		1 Paket	28,511,855,174
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	27,154,147,785		1 Paket	28,511,855,174
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 paket	15,800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	16,590,000,000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023



1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan sarana Permukiman yng dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/kota	Purwakarta	0 Sistem Jaringan 1 paket	9,354,147,785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Sistem Jaringan 1 paket	9,821,855,174
1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1,050,000,000
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Superv Pembangunan/Rehabilita TPA/TPST/SPA Kewenang Jumlah Peserta yang Men Pembinaan Penyelenggar Infrastruktur Kawasan Per Kawasan strategis Daerah Kabupaten/kota	Purwakarta	1 Dokumen 1 paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen 1 paket	1,050,000,000
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				33,400,000,000			35,070,000,000
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Paket	20,000,000,000		1 Paket	21,000,000,000
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Paket	145,000,000		1 Paket	152,250,000
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Purwakarta	5 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	26,250,000
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	5 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	26,250,000
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Laporan	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	36,750,000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Paket	9,995,016,867		1 Paket	10,494,767,710
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	72 orang	9,945,016,867	Dana Perimbangan	72 orang	10,442,267,710
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	1 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	26,250,000
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Purwakarta	1 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	26,250,000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Purwakarta		25,000,000			26,250,000
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	1 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	26,250,000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023



1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Paket	425,000,000		1 Paket	446,250,000
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Purwakarta	1 paket	225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	236,250,000
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta	3 orang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 orang	210,000,000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	1 Paket	1,050,000,000		1 Paket	1,102,500,000
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 paket	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	157,500,000
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	1 paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	105,000,000
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 paket	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	315,000,000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Purwakarta	1 paket	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	210,000,000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	1 Laporan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	210,000,000
1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta	1 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	105,000,000
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 Paket	1,350,000,000		1 Paket	1,417,500,000
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Purwakarta	1 unit	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	525,000,000
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta	1 unit	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	367,500,000
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Purwakarta	1 unit	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	525,000,000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 Paket	5,819,983,133		1 Paket	6,110,982,290
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	1 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10,500,000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta	1 Laporan	259,981,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	272,980,260
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 Laporan	5,550,001,933	Dana Perimbangan	1 Laporan	5,827,502,030
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	1 Paket	1,190,000,000		1 Paket	1,249,500,000
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	1 Unit	440,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	462,000,000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023



1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta	1 unit	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	525,000,000
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta	1 unit	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	262,500,000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	4,750,000,000		1 Paket	4,987,500,000
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Paket	100,000,000		1 Paket	105,000,000
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Purwakarta	1 Dokumen	100,000,000		1 Dokumen	105,000,000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Purwakarta		4,500,000,000			4,725,000,000
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Purwakarta	1 Unit Rumah	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit Rumah	525,000,000
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Dokumen	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1,050,000,000
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 Ha	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Ha	1,050,000,000
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Purwakarta	1 Unit Rumah	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit Rumah	1,050,000,000
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Purwakarta	1 Unit Rumah	1,000,000,000		1 Unit Rumah	1,050,000,000
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Purwakarta	1 Paket	150,000,000		1 Paket	157,500,000
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Purwakarta	1 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	105,000,000
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Purwakarta	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	52,500,000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kawasan Permukiman yang dibangun/dipelihara/dipe	Purwakarta	1 Paket	2,650,000,000		1 Paket	2,782,500,000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Purwakarta		1,600,000,000			1,680,000,000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023



1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Purwakarta	1 Unit	1,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	1,680,000,000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Purwakarta	1 Paket	1,050,000,000		1 Paket	1,102,500,000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Purwakarta	1 Unit Rumah	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit Rumah	1,050,000,000
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Purwakarta	1 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	52,500,000
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Penataan PSU Perumahan yang sudah serah terima	Purwakarta	1 Paket	1,000,000,000		1 Paket	1,050,000,000
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Purwakarta		1,000,000,000			1,050,000,000
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Purwakarta	1 Unit Rumah	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit Rumah	1,050,000,000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Purwakarta	1 Paket	5,000,000,000		1 Paket	5,250,000,000
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Purwakarta		5,000,000,000			5,250,000,000
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Purwakarta	1 paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1,050,000,000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian	Purwakarta	1 paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1,050,000,000
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Umum Perumahan	Purwakarta	1 paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1,050,000,000
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan PSU Perumahan	Purwakarta	1 paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1,050,000,000
1	04	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	Purwakarta	1 paket	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 paket	1,050,000,000
TOTAL									76,754,147,785			80,591,855,174



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun Ke 1	Tahun Ke 2	Tahun Ke 3	Tahun Ke 4	Tahun Ke 5	
1	Presentase Kawasan Kumuh yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan	5	5	5	5	5	5	5
2	Presentase Cakupan layanan Air Minum	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5
3	Rasio Rumah Layak Huni	93.29	93.29	93.29	93.29	93.29	93.29	193.29



BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Restra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Purwakarta yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018 - 2023.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2023, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2018 – 2023 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap tahunnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018 - 2023.